



**RENSTRA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

PERIODE TAHUN 2016-2021

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Jl. Kapt. Pierre Tendean – Kuala Tungkal



KATA PENGANTAR

Renstra atau Rencana Strategis merupakan arah kebijakan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan akan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dan menjadi akses kontrol masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, kita juga diharapkan akan mampu mengantisipasi tantangan dinamika pembangunan dimasa mendatang dan mampu memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi dan isu global yang menjadi komitmen nasional serta akselerasi pembangunan di daerah.

Semoga dalam penyusunan renstra ini bermanfaat bagi kita sebagai penyelenggara pemerintah dan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak terkait, terima kasih.





DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 9	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya SKPD	16
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	27
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	30
3.3 Telaah K/L dan Renstra	34
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	55





BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	56
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	56
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..	64
BAB VII	PENUTUP	66





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Sebagaimana ketentuan tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah rencana pembangunan dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).





Kabupaten Tanjung Jabung yaitu Visi, Misi Bupati terpilih Tahun 2016-2021.

Pembangunan dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai bagian dari pembangunan daerah dan nasional, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki masalah sosial.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
3. Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung





Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nergara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan





- daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekontrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816):
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi





Rancangan Peraturan Daerah Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2006 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat





1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 :

1. Sebagai Dokumen perencanaan Jangka Menengah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang diamanahkan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Sebagai acuan bagi aparat Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan.
3. Sebagai acuan dalam mengukur kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Barat Tahun 2016-2021 :

1. Sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial dan penganggarannya.
2. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Sebagai Pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.





1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial disusun dari Bab I sampai Bab VII dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pembahasan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan umum tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Organisasi Perangkat Daerah .

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan isi-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bagian ini dikemukakan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.





BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG UURUSAN

BAB VIII PENUTUP







BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini disusun dengan maksud menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial gambaran umum tentang kondisi daerah masa kini, dengan memberikan perhatian utama pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang akan diimplementasikan melalui kebijakan dan program pembangunan selama lima tahun kedepan.

Kesejahteraan sosial diwujudkan dengan mengatasi, mengurangi maupun memberikan kemudahan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), disamping itu memberikan peluang berkembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sehingga mampu mandiri dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No 61 Tahun 2016.

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah di Bidang Sosial.





Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
2. Melaksanakan Kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
4. Melaksanakan administrasi di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya uraian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat masing-masing sebagai berikut

A. Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;





- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

B. Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuanganeua meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;





- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

C. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, orang terlantar, pekerja migran bermasalah dan orang dengan gangguan jiwa;





- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,





- pemantauan dan evaluasi pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta penyelenggaraan penanganan orang terlantar/orang tidak mampu, mayat orang terlantar/orang tidak mampu;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi indentifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin, pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin;
 - d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Program
3. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial





- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
 - c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- a. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial
 - b. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - c. Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Komposisi dan Tingkat Pendidikan Aparatur

1. Jumlah aparatur Dinas Sosial ada 20 orang terdiri dari:

- Pegawai Negeri Sipil sebanyak : 20 orang
- Pegawai TKS/TKK (honorar) sebanyak : 15 orang

Adapun kebutuhan ideal pejabat struktural adalah:

1. Pejabat eselon 2 : 1 Orang
2. Pejabat Eselon 3 : 3 Orang
3. Pejabat Eselon 4 : 8 Orang.
4. Apa bila 1 Pejabat eselon 4 memiliki 2 orang staf,
maka kebutuhan staf 16 orang.
5. Jabatan fungsional Bendahara 1 orang

Maka kebutuhan Jumlah ASN yang ideal sebanyak 29 orang.

6. Pendidikan terakhir aparatur

- a. Strata 1 (satu) sebanyak : 13 orang
- b. SMA sederajat sebanyak : 6 orang

7. Pendidikan terakhir honorar

- a. Strata 1 (satu) sebanyak : 3 orang
- b. SMA sederajat sebanyak : 16 orang
- c.

Sarana dan Prasarana





Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki sarana prasana penunjang untuk kelancaran tugas dan program kegiatan hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Jumlah Sarana Perlengkapan pada Dinas Sosial
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No Urut	Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	Sepeda Motor Roda 2	10 Unit	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit	Baik
3	Mesin Speed Boat	1 Unit	Baik
4	Alat Penyemprot	1 Buah	Baik
5	Mesin Potong Rumput	1 Unit	Baik
6	Lemari Besi	1 Buah	Baik
7	Rak Besi Dinding	1 Paket	Baik
8	Filing Kabinet 4 Pintu	6 Buah	Baik
9	Lemari Kayu 2 Pintu	10 Buah	Baik
10	Kursi Stenlist	48 Buah	Baik
11	Rak Kayu/Kaca	4 Buah	Baik
12	Meja Biro	5 Buah	Baik
13	Meja Rapat	1 Buah	Baik
14	Kursi Putar Bertangan	1 Buah	Baik
15	Kursi Putar	7 Buah	Baik
16	Kursi Besi Lipat	15 Buah	Baik
17	Meja Komputer	2 buah	Baik





18	Meja ½ Biro	25 buah	Baik
19	Meja Pelaksana	3 Buah	Baik
20	Sofa/Meja Kursi Tamu	1 Set	Baik
22	Teralis Besi	3 Buah	Baik
23	Gorden	4 Meter	Baik
24	Alat Pembersih/Heig Preasure	1 Unit	Baik
25	AC	9 Unit	Baik
26	UPS/Stabilizer	1 Unit	Baik
27	Tangga aluminium	4 Unit	Baik
28	Komputer	6 Unit	Baik
29	Lap Top	4 Unit	Baik
30	Printer	5 Unit	Baik
31	Televisi	2 Unit	Baik
32	Pesawat Rig/Radio/HF/ FM/Handy Talkie	1 Paket	Baik

2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

- a. Target kinerja pelayanan bidang sosial 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015)
 1. Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh perlindungan dan pelayanan sosial selama kurun waktu 2011-2015 sebanyak 718 orang dari target 801 orang atau sebesar 89,63 %
 2. Jumlah penyandang cacat berat yang memperoleh bantuan sosial selama kurun waktu 2012-2015 tahun sebanyak 158 orang/perbulan sebesar Rp. 300.000,- (dana APBN)





3. Jumlah bantuan penyandang cacat yang memperoleh bantuan sosial berupa alat bantu kecacatan kurun waktu 2011-2015 sebanyak 36 orang
4. Persentase lanjut usia yang memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama kurun waktu 2010-2015 sebanyak 60 orang pertahun (dana APBN)
5. Jumlah satuan penanggulangan siaga bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana sebanyak 55 orang
6. Jumlah bantuan keluarga miskin dan anak terlantar periode 2010-2015 sebesar 101 %
7. Jumlah bantuan langsung pemberdayaan sosial (KUBE) periode 2010-2015 sebesar 52 %

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.1 tentang Pencapaian Kinerja pelayanan SKPD dibawah ini :





Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)
1	Bantuan keluarga Miskin dan Anak Terlantar		801 Orang		150	156	160	165	170	122	184	200	165	141	81,33	117,95	125,00	100,00	82,94
2	Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial		242 KUBE		45	47	50	50	50	0	40	50	-	35	-	85,11	100,00	-	70,00

Setelah memperhatikan uraian tabel 2.1 tentang Pencapaian kinerja pelayanan SKPD 2011-2016 diatas dapat kita ketahui bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung jabung Barat periode sebelumnya dapat diasumsikan sudah pada jalur yang benar meskipun masih ada yang belum mencapai sasaran/target akan tetapi ada pula yang melebihi target hal inilah yang menjadi acuan selanjutnya untuk bagaimana pada periode – periode selanjutnya yaitu tahun 2016-2021.





**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT 2016 - 2021**

**Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Uraian Wajib	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	486.414.100	630.792.900	632.640.300	722.544.700	546.696.200	463.622.242	617.009.398	598.706.666	662.910.208	539.176.946	95,31	97,81	94,64	91,75	98,62	15.070.525	18.888.676
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	992.870.000	1.265.237.500	2.573.595.000	944.762.000	1.956.487.000	979.779.355	1.233.328.400	2.498.750.500	898.985.064	1.891.578.423	98,68	97,48	97,09	95,15	96,68	240.904.250	227.949.767
Peningkatan Disiplin Aparatur	43.750.000	16.000.000	17.725.000	33.650.000	22.775.000	43.100.000	15.884.000	17.607.000	33.060.000	22.725.000	98,51	99,28	99,33	98,25	99,78	5.243.750-	5.093.750-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000	50.000.000	70.000.000	92.000.000	6.000.000	27.050.000	21.755.000	38.950.000	60.450.000	6.000.000	60,11	43,51	55,64	65,71	100	9.750.000-	5.262.500-
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	42.257.700	-	-	-	-	42.257.700	-	-	-	-	100,	10.564.425	10.564.425
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	-	-	136.700.000	165.749.000	28.884.250	-	-	132.278.500	140.161.500	28.880.250	-	-	96,77	84,56	99,99	7.221.063	7.220.063
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	177.876.900	417.322.000	375.625.475	407.851.300	165.569.600	155.683.900	347.721.500	297.522.675	252.239.000	116.542.600	87,52	83,32	79,21	61,85	70,39	3.076.825-	9.785.325-





**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT 2016 - 2021**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	-		80.312.500	95.963.500	25.905.550	-		80.312.450	85.336.300	25.905.550	-	-	100	88,93	100	6.476.388	6.476.388
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	342.572.900	355.034.000	619.871.050	817.301.500	500.005.500	316.551.300	354.080.500	557.608.450	692.653.000	389.972.600	92,40	99,73	89,96	84,75	77,99	39.358.150	18.355.325
Perlindungan Sosial	57.650.250	129.414.100	334.441.950	697.092.000	253.151.700	56.668.250	129.011.600	299.577.579	614.609.550	218.145.950	98,30	99,69	89,58	88,17	86,17	48.875.363	40.369.425
Jumlah	3.295.230.150	4.441.985.700	7.532.141.419	8.456.633.200	5.188.306.300	3.125.537.047	4.233.235.548	7.048.486.514	6.751.914.822	4.384.740.669	94,85	95,30	93,58	79,84	84,51	473.269.038	314.800.906





Setelah penyajian tabel 2.2 dapat kita lihat rasio antara anggaran dan realisasi anggaran secara keseluruhan dapat dikategorikan baik, kecuali realisasi anggaran pada tahun 2015, hal ini dikarenakan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp. 8.162.539.900,- (Delapan miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 5.188.306.300,- (Lima miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 4.384.740.669,- (Empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 84,51 % sehingga ada beberapa Program pembangunan yang realisasinya masih dibawah 80 % misalnya program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Sosial meliputi kapasitas SDM, sarana dan Prasarana sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan Diklat Fungsional ;
2. Tersusunnya dokumen perencanaan, meliputi Renstra OPD, Renja OPD
3. Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi, meliputi Laporan Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Asset Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat





2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi bidang Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Sosial maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal merupakan Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats) masing-masing lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut

1. Lingkungan Internal

kekuatan (S) :

- 1) Kewenangan dibidang Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Adanya Peraturan Perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial yang sudah ada
- 2) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
- 3) Tersedianya anggaran

Kelemahan (W) :

- 1) Jaringan sistem informasi sosial belum tersedia
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia profesional
- 3) Sarana Prasarana penunjang kerja belum memadai
- 4) Anggaran yang sangat terbatas
- 5) Kurangnya tenaga fungsional dibidang sosial





2. Lingkungan Eksternal

Peluang (O) :

- 1) Letak Kabupaten Tanjung jabung Barat yang strategis
- 2) Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial
- 3) Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat, dan panti milik masyarakat

Ancaman (T) :

- 1) Tingginya jumlah penduduk miskin
- 2) Jumlah pengangguran yang tinggi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- 1) Pelatihan SDM (PNS) dibidang sosial
- 2) Meningkatkan peran peran dan pungsi STKS

2. Strategi W-O

- 1) Membuat Jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana
- 3) Optimalisasi penggunaan anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat





3. Strategi S-T

Meningkatkan pelayanan sosial masyarakat

4. Strategi W-T

- 1) Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan PSKS dan PMKS
- 2) Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional bidang sosial untuk membantu korban bencana alam dan korban masalah sosial lainnya.





BAB III

PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan utama Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugasnya pokok dan fungsinya yaitu:

a. Permasalahan penyelenggaraan Bidang Sosial

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dewasa ini ditandai dengan kemajuan teknologi, industrialisasi, urbanisasi dan berbagai gejala kemasyarakatan menimbulkan banyak masalah sosial. Apabila tidak segera ditangani, maka masalah ini akan semakin menyebar dan semakin berdampak pada masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang terintegrasi dan terorganisasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Masalah sosial timbul dari berbagai sebab, baik faktor pelaku (internal factors) maupun faktor lingkungan (eksternal factors). Faktor-faktor internal dan eksternal saling berinteraksi dan berinterdependensi, sehingga masalah sosial biasanya kompleks dan tidak mudah dipecahkan. Masalah sosial mempunyai berbagai dimensi,





baik ekonomi, sosial, budaya, biologis, psikologis, spiritual, hukum, maupun keamanan, sehingga masalah sosial hanya bisa didekati secara lintas sektor dan interdisipliner.

Perubahan dan perkembangan masyarakat terjadi secara bervariasi, artinya ada yang terjadi secara lambat (evolusion), namun ada yang terjadi secara cepat (revolution). Perubahan dan perkembangan masyarakat secara cepat, apalagi tidak direncanakan dengan baik (unplanned), biasanya menimbulkan masalah sosial. Masyarakat senantiasa berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan tersebut, namun biasanya ada sekelompok individu yang tidak mampu melakukannya, sehingga berada dalam kesulitan (private troubles) dan masalah (private problems). Pada umumnya, masalah sosial yang berkembang pada saat ini terbagi ke dalam dua golongan, yaitu :

1) Masalah sosial konvensional (*persistent sosial problems*) atau disebut juga masalah sosial tradisional. Jenis masalah ini pada dasarnya senantiasa ada sejak zaman dahulu. Keberadaannya kurang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta proses perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Masalah sosial konvensional, diantaranya :

a. Kemiskinan, baik yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Karakteristik penduduk yang tergolong ke dalam masalah kemiskinan adalah kelompok fakir, kelompok miskin, dan kelompok kelas bawah atau





- warga kurang beruntung serta kelompok residual atau marginal.
- b. Wanita rawan sosial ekonomi.
 - c. Keluarga berumah tidak layak huni
 - d. Keterlantaran, meliputi : Balita terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar
 - e. Keterasingan/keterpencilan, yang termasuk kedalam kelompok ini adalah masyarakat terasing atau komunitas adat terpencil (KAT),
 - f. Kecacatan.
 - g. Ketunaan Sosial
 - h. Bencana, baik yang diakibatkan oleh peristiwa alam, ulah manusia maupun kombinasi keduanya.
- 2) Masalah sosial kontemporer disebut juga masalah sosial baru, merupakan untuk masalah sosial yang timbul karena berbagai dampak pembangunan atau kebijakan politik dewasa ini serta perubahan dan perkembangan masyarakat. Masalah sosial yang termasuk ke dalam kelompok masalah sosial kontemporer diantaranya korban tindak kekerasan/perlakuan salah, anak jalanan, keluarga yang bermasalah sosial psikologis, korban Penyalahgunaan Narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) HIV/AIDS, dan pemukiman tidak layak huni.

Permasalahan sosial itu tentunya haruslah ditangani melalui suatu pembangunan kesejahteraan sosial yang nyata dan berkesinambungan hal ini terkait dengan kebutuhan dasar bagi PMKS. Oleh karenanya agar hasil pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat dan





berdampak terhadap kehidupan PMKS yang lebih baik, maka kata kuncinya adanya bagaimana system perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial itu dapat dibangun dengan baik serta memperhatikan kebutuhan dasar PMKS secara tepat, sehingga kehadiran Negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial akan semakin nyata dan terwujud, dan terhindar dari adanya berbagai kepentingan politik yang hanya berimplikasi kepada rendahnya kesadaran masyarakat.

3.2. Telaah Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode tahun 2016-2021 telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Untuk membangun fondasi bagi implemementasi kebijakan sampai dengan tahun 2021, juga telah disiapkan beberapa program strategis untuk menjalankan 4 (empat) misi yang dituangkan dalam agenda Pembangunan Daerah untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan pokok daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2016-2021, adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN
BERKUALITAS”**





Makna pokok yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju,** Merupakan Daerah yang memiliki standar hidup yang relatif tinggi serta ekonomi merata. Meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat, PDRB tinggi melalui eksploitasi Sumber Daya Alam, mengembangkan industri yang beragam, dan ekonomi kerakyatan.
2. **Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Adil,** adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal baik menyangkut benda atau orang, Meningkatkan anggaran daerah yang prorakyat, terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan agraria yang lebih adil bagi rakyat, Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.
3. **Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Makmur,** Makmur kehidupan warganya dan melimpah kekayaan wilayahnya ini dapat dilihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. **Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Bermartabat,** Suatu kondisi kehidupan manusia ideal, yakni lengkapnya penghargaan dan pemenuhan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karsanya secara nyata
5. **Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Berkualitas,** adalah tingkat baik buruknya atau taraf hidup atau derajat hidup masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.





Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan 4 (empat) Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 – 2021 sbb ;

Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan Infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas

Misi II : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup

Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan

Misi IV : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik

Dari keempat misi tersebut diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menitik beratkan pada pencapaian target misi ketiga yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agro industri dan perikanan melalui Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif dan Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

Untuk mendukung terwujudnya misi tersebut, maka dilakukan kajian dan analisis untuk menetapkan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan antara lain :





1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pelayanan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan dinas
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan disiplin kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas aparatur
5. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase kualitas perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan program keuangan dan aset
6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase Peningkatan pelayanan kepada para penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pembentukan dan pemberdayaan orsos/lembaga sosial masyarakat lainnya.
8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Jumlah PMKS





9. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase para penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang menerima jaminan sosial

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Sosial RI tahun 2015-2019

Pemerintah Republik Indonesia tahun 2015 -2019 akan melaksanakan 7 (tujuh) misi pembangunan Nasional yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

dari 7 (tujuh) misi pemerintah tersebut diatas Kementerian Sosial RI akan melaksanakan misi keempat yaitu :





“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”

Dan Kementerian Sosial RI dalam 5 (lima) tahun kedepan mengedepankan 4(empat) agenda dari 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu :

- Nawacita no 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
- Nawacita no 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia
- Nawacita no 8 : melakukan revolusi karekter bangsa
- Nawacita no 9 : Memperteguh kehinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Untuk mewujudkan semua itu Kementerian Sosial RI mempunyai Visi Rencana Strategis tahun 2015-2019 yaitu :

“ Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Tujuan Kementerian Sosial RI tahun 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Arah kebijakan Kementerian Sosial RI tahun 2015-2019 adalah :

1. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif;





2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan (dalam rangka Peningkatan kesejahteraan keluarga);
3. Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar;
4. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

Sasaran Strategis Kementerian Sosial RI tahun 2015-2019 adalah :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya sebesar 1 persen dari target nasional pada tahun 2019, melalui:
 - a. Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar
 - b. Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas
2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui:
 - a. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - b. Peningkatan kualitas pendamping dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - c. Peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.





Target Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Sosial RI tahun 2015-2019 adalah

1. Persentase (%) meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya termasuk *warga korban bencana* dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Persentase (%) meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas.
3. Persentase (%) SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Program, Kegiatan dan Target Kementerian Sosial RI tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- I. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- II. Program Pemberdayaan Sosial
- III. Program Penanganan Fakir Miskin

Sejalan dengan itu pula Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Tanjung jabung Barat telah menyusun 5 (lima) program kerja prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti terlihat dalam RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.





Sejalan dengan itu pula Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Tanjung jabung Barat telah menyusun 5 (lima) program kerja prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti terlihat dalam RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

3.3.2 Telaah Renstra Provinsi Jambi tahun 2016-2021

Visi, Misi dan Program Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Untuk membangun fondasi bagi implemementasi kebijakan sampai dengan tahun 2021, juga telah disiapkan beberapa program strategis untuk menjalankan enam misi yang dituangkan dalam agenda Pembangunan Daerah untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan pokok daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan Provinsi Jambi untuk Tahun 2016-2021, adalah :

**“TERWUJUDNYA JAMBI YANG TERTIB, UNGGUL,
NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA
”JAMBI TUNTAS 2021”**





Penjelasan Visi berdasarkan Kata Kunci pada Visi Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

VISI	URAIAN VISI
PROVINSI JAMBI YANG TERTIB	Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan harmonis .
PROVINSI JAMBI YANG UNGGUL	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang berdaya saing.
PROVINSI JAMBI YANG NYAMAN	Terwujudnya kehidupan masyarakat Aman, Tentram, dan Damai untuk mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif
PROVINSI JAMBI YANG TANGGUH	Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi.
PROVINSI JAMBI YANG ADIL	Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata tanpa ada deskriminasi perbedaan individu, golongan maupun wilayah
PROVINSI JAMBI YANG SEJAHTERA	Terwujudnya masyarakat jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.

2) Misi

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan Provinsi Jambi sebagai berikut :





1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan jaminan kepastian hukum.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri
5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, Pengelolaan energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
6. Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan modal

Prioritas pembangunan Provinsi Jambi lima tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi pembangunan tahun 2016-2021, yang dikaitkan dengan Sembilan Agenda Nasional sebagaimana dimaksud dalam **NAWACITA**, maka program prioritas Pemerintah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

AGENDA NAWACITA	PROGRAM PRIORITAS
Agenda 1 Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat antar daerah kabupaten/kota2. Memfasilitasi pembinaan keamanan dan ketertiban; (koordinasi keamanan wilayah di Forkompimda)3. Pembinaan kerukunan dan toleransi anatar suku dan anatar umat beragama4. Pemberian kepastian hukum terhadap haka adat dan hak ulayat masyarakat local dan komunitas adat terpencil serta masyarakat transmigrasi5. Pemberian bantuan hukum dan pendampingan masyarakat





	<p>kurang mampu guna melindungi hak-haknya sebagai warga negara</p> <ol style="list-style-type: none">6. Pembinaan dan pelatihan keterampilan terhadap eks penyandang penyakit masyarakat7. Pembinaan dan perlindungan sosial bagi Penyandang Penyakit Sosial serta korban bencana alam dan bencana sosial lainnya.8. Peningkatan kualitas hukum daerah
<p>Agenda 2:</p> <p>Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan manajemen pelayanan, dan integrasi pelayanan melalui pengembangan sistem e-government yang terintegrasi dengan kabupaten/kota.2. Peningkatan jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan satu pintu, PATEN (Kecamatan) dan PATEK (Kelurahan).3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi publik dan pengawasan pembangunan, pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah.4. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan.5. Peningkatan proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur, berserta peningkatan kualitas pengawasan.6. Peningkatan kualitas dan etos kerja melalui perbaikan sistem rekrutmen, promosi, mutasi, dan rasionalisasi.7. Peningkatan Tunjangan Kinerja Daerah8. Peningkatan quota perempuan dalam jabatan pemerintahan dan kedudukan strategis lainnya9. Peningkatan peran dan fungsi legislative
<p>Agenda 3:</p> <p>Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Alokasi bantuan infrastruktur desa sebesar 200.000.000 per desa (jumlah desa 1389 desa)2. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui peningkatan kualitas SDM Pemerintah Daerah/Desa.3. Fasilitasi kerjasama antar desa antar kabupaten/kota, antar lembaga, dan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan.4. Tambahan penghasilan bagi aparatur desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) pertahun;





Agenda 5 :

Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

1. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Rumah sakit Provinsi dan Rumah Sakit Muaro Bungo dari kelas B ke Kelas A sebagai Rumah sakit rujukan Regional).
2. Pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi Provinsi Jambi.
3. Pemberian Jaminan Kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu non Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
4. Pemberian tambahan penghasilan non guru sertifikasi dan tenaga medis daerah terpencil.
5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan melalui status puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap, rawat inap menjadi rawat inap plus serta pemerataan dokter spesialis dan tenaga medis lainnya.
6. Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera.
7. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kewaspadaan rawan gizi dan pangan.
8. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
9. Peningkatan pelayanan masyarakat Veteriner dan kesehatan hewan.
10. Peningkatan kualitas penyelenggaraan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah.
11. Peningkatan peran serta masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.
12. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
13. Peningkatan APM dan APK pada jenjang pendidikan menengah melalui pendidikan gratis.
14. Kuliah gratis untuk 15.000 orang anak kurang mampu untuk tingkat sarjana di perguruan tinggi negeri/swasta.
15. Pembangunan sekolah kejuruan (SMK, politeknik), Sciens part dan techno part sesuai potensi daerah.
16. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan melalui optimalisasi balai pelatihan kerja, penyediaan fasilitas peralatan, kerja dan instruktur yang berkompeten.
17. Perlindungan ketenagakerjaan
18. Penguatan informasi dan pengetahuan masyarakat





	<p>tentang kesetaraan gender.</p> <p>19. Pemberdayaan masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar.</p> <p>20. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p> <p>21. Peningkatan kualitas hidup bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Komunitas Adat lainnya</p>
<p>Agenda 6:</p> <p>Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani dan mendukung kedaulatan pangan; (peningkatan kapasitas penyuluh, bantuan Alsintan dan sarana produksi)2. Peningkatan nilai tukar petani; (peningkatan kualitas produksi, fasilitasi akses pasar, peningkatan pembangunan jalan produksi, peningkatan keterampilan dan pengetahuan petani) Peningkatan investasi industri pengolahan dan pemberdayaan petani dalam penguasaan teknologi tepat guna; (pemanfaatan hasil inovasi teknologi daerah)
<p>Agenda 7:</p> <p>Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi melalui pemberdayaan dan pendampingan serta akses permodalan2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan dan sentra produksi ekonomi masyarakat sesuai RTRW Provinsi, Kabupaten /Kota3. Pengembangan dan promosi industri ekonomi kreatif berbasis komunitas dan komoditas daerah (Kebijakan/regulasi, pembangunan sentra ekonomi kreatif, penyiapan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif)4. Peningkatan produktivitas usaha koperasi dan UKM5. Pengembangan dan penataan pasar rakyat6. Pengembangan usaha industri rumah tangga, kecil dan menengah7. Pengembangan usaha perdagangan dan jasa8. Peningkatan daya saing investasi9. Pengembangan agribisnis perkotaan10. Penyiapan kawasan niaga dan industri yang ramah lingkungan11. Penyiapan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan





	kawasan Desa Pertumbuhan. 12. Peningkatan pendapatan daerah 13. Peningkatan manajemen pengolaan keuangan daerah
Agenda 8: Akan melakukan revolusi karakter bangsa	1. Peningkatan peran lembaga adat dalam pelestarian budaya daerah 2. Peningkatan fasilitas penunjang pelestarian seni dan budaya daerah 3. Peningkatan pembinaan generasi muda dan seni budaya melalui menumbuhkembangkan seni dan budaya daerah 4. Peningkatan fasilitas dan pembinaan olahraga di sekolah menengah di desa/kelurahan 5. Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan karang taruna 6. Pemberdayaan organisasi sosial dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 7. Pemberian tunjangan kesejahteraan, tunjangan kependidikan dan penghargaan bagi olahragawan daerah yang berprestasi

a. Pernyataan Visi

Adapun Visi Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah

“Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan, Transmigrasian menuju Jambi TUNTAS 2021”

Makna dari pernyataan “Visi” tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mengandung arti bahwa pelayanan sosial merupakan hak dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang mutlak dan wajib dilakukan, dengan memberdayakan potensi kesejahteraan sosial, kemampuan, kebutuhan dan proses yang





berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembangunan kesejahteraan sosial yang adil dan bermartabat yang didalamnya terkandung nilai-nilai kesetiakawanan sosial.

2. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan, mengandung arti bahwa ketenagakerjaan merupakan sumber inventasi ekonomi yang di harus diwujudkan dalam usaha-usaha untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong peningkatan produktivitas, daya saing dan kompetensi tenaga kerja serta dapat menciptakan iklim perlindungan kerja yang sehat dan aman. Tujuan dari visi ini adalah untuk menciptakan peluang kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Jambi, melalui sinergi antar sektor dan stake holder terkait yang akan berimplikasi kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.
3. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketransmigrasian, mengandung arti bahwa keteransmigrasian merupakan potensi yang besar untuk di optimalkan kembali untuk mendorong agar tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan dan pembangunan antar desa dan kota. Tujuan dari visi ini adalah agar masyarakat transmigrasi dapat meningkatkan pengelolaan potensi dan sumber-sumber daya lokal yang ada di lokasi transmigrasi secara produktif untuk membuka aksesibilitas bagi pusat-pusat pertumbuhan desa dan wilayah serta





membuka kesempatan masyarakat untuk bertransmigrasi.

b. Pernyataan Misi

Misi Dinas Sosial Provinsi Jambi merupakan rumusan secara garis besar mengenai cara dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD beserta perangkatnya untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial Provinsi Jambi, yaitu :

- a. **Misi 1** :Mendorong peningkatan pelayanan kesejahteraan social yang berorientasi kepada pemberdayaan, produktivitas dan taraf hidup PMKS.
- b. **Misi 2** :Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien bagi tercapainya taraf kesejahteraan sosial.
- c. **Misi 3** : Mendorong sinergitas dan peran serta masyarakat, swasta dan potensi sosial lainnya dalam usaha-usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. **Misi 4**: Meningkatkan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
- e. **Misi 5** : Mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
- f. **Misi 6**:Mendorong peningkatan perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif.
- g. **Misi 7** :Mendorong pengembangan kawasan transmigrasi.

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai visi, melaksanakan misi,





memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan FAKIR Miskin yang dihadapi.

a. Tujuan

Adapun Tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu :

- 1) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain
 - a. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui Pemberdayaan bagi fakir miskin.
 - b. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Komunitas Adat lainnya.
 - c. Meningkatkan pembinaan, pemberdayaan, rehabilitasi, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS melalui usaha pemberdayaan ekonomi produktif, rehabilitasi, bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, baik dalam dan luar panti.
 - d. Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui Pemberdayaan Orsos, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan lainnya.





b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu :

- 1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain :
 - a. Terwujudnya pengentasan kemiskinan bagi keluarga fakir miskin di Provinsi Jambi.
 - b. Terwujudnya pemberdayaan KAT yang produktif dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - c. Terwujudnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
 - d. Terwujudnya peran serta organisasi sosial/lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.





Adapun Program-program Dinas Sosial Provinsi Jambi selama periode Renstra 2016-2021, adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pelayanan administrasi yang efektif dan efisien dilingkungan Dinas.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan aparatur.

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan disiplin kerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN





Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan program, keuangan dan asset dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya.

7. PROGRAM PERLINDUNGAN, PELAYANAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)

Program Perlindungan, Pelayanan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), kinerja yang ingin dicapai adalah persentase KAT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

8. PROGRAM PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, REHABILITASI, BANTUAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi





Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kinerja yang ingin dicapai adalah persentase PMKS yang dilayani sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Setelah melakukan review terhadap Renstra Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi dapat dilihat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran Renstra SKPD terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Jambi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Hal ini dapat kita lihat keserasiannya dari Visi dan Misi yang dikaitkan dengan 9 (sembilan) Agenda nasional (Nawacita) serta melihat tujuan dan sasaran jangka menengah dan program-program yang ada pada Dinas Sosnakertrans Prov Jambi, maka dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tanjung jabung Barat sudah sejalan dengan Nawacita dan Program Prioritas Nasional maupun dengan Visi dan Misi Jambi TUNTAS 2021, keterkaitannya dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini

Agenda Nasional	Prioritas Pembangunan Prov Jambi 2016-2021	Program Prioritas Dinas Sosial Kab Tanjab Barat
Agenda Nawacita 1 : Akan menghadirkan kembali Negara untuk	Pembinaan dan perlindungan sosial bagi penyandang penyakit sosial serta korban	Pemberdayaan Fakir Misikin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya





melindungi segenap Bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara	bencana alam dan korban bencana sosial lainnya	
Agenda Nawacita 5 : Akan meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia melalui Indonesia pintar, Indonesia sehat, indonesia kerja, dan Indonesia Sejahtera	1.Pemberdayaan masyarakat miskin dan PMKS lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar 2.peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial
Agenda Nawacita 8 : Akan melakukan revolusi karakter bangsa	Pemberdayaan orsos/Lembaga sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial





3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan dibidang Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian. Dan setelah melakukan review terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 dapat dilihat keterkaitannya dengan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat meskipun tidak secara langsung. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada uraian resume dibawah ini :

1. Pada paragraf ke 5 Kawasan Rawan Bencana Alam pasal 32 yang berisikan :

- 1) Kawasan Bencana Banjir terdapat pada Kecamatan Betara, Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu, dan Kecamatan Muara Papalik
- 2) Kawasan Rawan Kebakaran diKecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Bramitam dan Kecamatan Kuala Betara
- 3) Kawasan Rawan Bencana Lonsor di Kecamatan Merlung
- 4) Kawasan Rawa Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Senyerang, Kecamatan pengabuan dan Kecamatan seberang Kota
- 5) Kawasan Rawan Bencana puting Beliung di Kecamatan Tungkal ulu dan Kecamatan Betara





Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memberikan bantuan untuk korban dalam kawasan bencana banjir, Kawasan Rawan Kebakaran, Kawasan Rawan Bencana Longsor, Kawasan Rawan Gelombang Pasang Surut dan Kawasan Rawan Bencana Puting Beliung.	<ul style="list-style-type: none">- Kejadian bencana sulit diprediksi khususnya bencana kebakaran- Kurang tersedianya Buffer Stok untuk korban bencana.- Masih minimnya dukungan dana APBD	Fenomena perubahan iklim yang tidak menentu akibat dari pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada terjadinya bencana, baik bencana banjir, kebakaran dan tanah longsor serta kurang kehati-hatian masyarakat dan tidak terdeteksi dini hubungan arus pendek yang berakibat pada terjadinya kebakaran	Semakin meningkatnya kesadaran ekologi dipacu keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang bila tidak ditangani dapat memberi dampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik di masa sekarang ataupun mendatang





3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Setelah melakukan review kembali terhadap faktor-faktor dari pelayanan Dinas Sosial yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan dan sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian, Maka isu yang akan ditangani melalui Renstra 2016-2021 diantaranya adalah

- Masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat secara jumlah maupun kompleksitas masalahnya
- Masalah kesejahteraan sosial semakin berat melanda semua strata dimana yang lama belum tuntas muncul masalah baru
- Terbatasnya sarana, prasarana dan SDM pelayanan kesejahteraan sosial
- Meningkatnya permasalahan sosial dari yang klasik sampai pada muncul fenomena baru





TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran organisasi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 4.1





Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target kinerja sasaran tahunan				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Taraf Hidup PMKS	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang menerima bantuan	%	40%	60%	70%	75%	80%
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Peran dan fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang aktif	%	40%	60%	65%	70%	75%
3	Meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat	Terpenuhinya pelayanan terhadap pemulangan tuna sosial, pelayanan dan perlindungan terhadap ABH terlantar, AMPK, anak dengan disabilitas, anak balita terlantar dan anak remaja yang rentan serta	Persentase Jumlah PMKS	%	10%	9,5%	9%	8,5%	8%
4	Penyandang cacat dan lanjut usia dapat melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya	Meningkatnya Pelayanan para penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang menerima jaminan sosial	Persentase para penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang menerima jaminan sosial	%	25%	25%	30%	35%	35%







BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai suatu arah pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi, Misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, Visi, Misi.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :





Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas			
MISI II : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelastarian lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan peran dan fungsi PSKS, Menciptakan kesamaan visi, misi persepsi dan langkah bagi orsos dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	1. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan PSKS Terciptanya kesamaan visi, misi dan persepsi dlm melaksanakan UKS	Memberikan pelayanan terhadap peran dan fungsi PSKS, orsos dan panti sosial dlm melaksanakan UKS Melaksanakan pelatihan pencari kerja kejuruan	Memberikan pelatihan keterampilan tenaga pekerja sosial, memberikan bantuan usaha ekonomi produktif, pendataan PMKS,







BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai suatu arah pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi, Misi organisasi.

Adapun rencana program dan kegiatan utama yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor





- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran
- Penyediaan Media Cetak/Elektronik

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan gedung kantor
- Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
- Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor
- Pengecoran Rabat Beton halaman Kantor
- Perencanaan Pengecoran Rabat Beton Halaman Kantor
- Pengawasan Pengecoran Rabat Beton Halaman Kantor
- Pengadaan kendaraan dinas operasional
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Pengembangan SDM

-





5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- Monitoring dan evaluasi program dan anggaran
- Menyusunan laporan keuangan

6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

- Pendataan Lanjut Usia
- Pendataan dan Pelaporan PMKS
- Pembinaan dan Monitoring Bansos Rastra dan BPNT
- Mekanisme Pemutahiran Mandiri Program Penanganan Fakir Miskin
- Pendataan fasilitasi UEP bagi Keluarga miskin
- Kesiapsiagaan bencana dan pemeliharaan Buffer stock barang bencana
- Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial Program Keluarga Harapan

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Optimalisasi peran dan fungsi karang taruna
- Verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin
- Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) dan PSM
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan
- Pemberdayaan PSKS
- Peningkatan Peranan Kapasitas Kerja Legiun Veteran
- Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan





- Penguatan Kelembagaan Komisi Daerah (Komda) Lansia
- Evaluasi dan monitoring bantuan langsung bantuan langsung pemberdayaan sosial
- Pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan, perdesaan dan pesisir

8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Peningkatan perlindungan dan asistensi sosial terhadap ABH, anak terlantar, AMPK, anak dengan disabilitas, anak balita terlantar dan anak remaja yang rentan
- Santunan pemulangan tuna sosial
- Operasi terpadu tuna sosial
- Penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba berbasis sekolah

9. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

- Pembuatan aksesibilitas bagi difabel/penyandang cacat
- Pembinaan ASPDB dan Aslut

Untuk lebih rincinya Rencana program prioritas, Indikator Kinerja dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :



Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come) dan Kegiatan (out put)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja, Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		Unit Krja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2017		2018		2019		2020		2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Peningkatan Pelayanan dan administrasi Sosial	Tertib pengelolaan administrasi perkantoran yang transparan dan akuntabel	6:01:01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	458,503,399	12 Bulan	916,100,000	12 Bulan	996,500,000	12 Bulan	1,067,000,000	12 Bulan	1,149,000,000	12 Bulan	4,587,103,399		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	1,023,000	12 Bulan	1,500,000	12 Bulan	2,000,000	12 Bulan	2,500,000	12 Bulan	3,000,000	12 Bulan	10,023,000		Sekretariat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	28,560,000	12 Bulan	40,000,000	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	52,000,000	12 Bulan	55,000,000	12 Bulan	225,560,000		Sekretariat
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	66,840,000	12 Bulan	80,000,000	12 Bulan	90,000,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	120,000,000	12 Bulan	456,840,000		Sekretariat
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	8,198,449	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	17,000,000	12 Bulan	18,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	78,198,449		Sekretariat
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	72,841,650	12 Bulan	80,000,000	12 Bulan	85,000,000	12 Bulan	90,000,000	12 Bulan	95,000,000	12 Bulan	422,841,650		Sekretariat
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	6,100,000	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	126,100,000		Sekretariat
			Penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	2,940,300	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	22,940,300		Sekretariat
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya media cetak/elektronik	12 Bulan	12 Bulan	6,000,000	12 Bulan	7,000,000	12 Bulan	8,000,000	12 Bulan	9,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	40,000,000		Sekretariat
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya/tersedianya makan dan minum rapat	12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	12 Bulan	3,600,000	12 Bulan	4,500,000	12 Bulan	4,500,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	20,600,000		Sekretariat
			Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	260,000,000	12 Bulan	650,000,000	12 Bulan	700,000,000	12 Bulan	750,000,000	12 Bulan	800,000,000	12 Bulan	3,160,000,000		Sekretariat
Penyediaan Cetak/Elektronik	tersedianya media cetak dan elektronik dan iklan layanan	12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	12 Bulan	4,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	6,000,000	12 Bulan	6,000,000	12 Bulan	24,000,000		Sekretariat			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come) dan Kegiatan (out put)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja, Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		Unit Krja Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						2017		2018		2019		2020		2021							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai	Pemeliharaan sarana dan prasarana dan peningkatan sarana dan prasarana yng memadai	6:01:02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	479,712,120	100%	1,358,525,000	100%	3,073,025,000	100%	850,000,000	100%	893,000,000	100%	6,654,262,120				
			Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung aula/Kantor							1,700,000,000						1 Paket	1,700,000,000	Sekretariat		
			Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor						51,000,000		51,000,000										
			Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor						34,000,000		34,000,000										
			Pengecoran Halaman Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana dan prasarana aparatur						460,500,000		460,000,000							920,500,000	Sekretariat	
			Perencanaan Pengecoran Rabat Beton							13,815,000		13,815,000									
			Pengawasan Pengecoran Rabat Beton							9,210,000		9,210,000									
			Pengadaan kendaraan dinas operasional	tersedianya kendaraan dinas operasional					3 Unit	60,000,000	2 Unit	40,000,000	2 Unit	40,000,000	2 Unit	40,000,000	2 Unit	40,000,000	9 Unit	180,000,000	Sekretariat
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor					10	191,462,120	10	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	50	791,462,120	Sekretariat
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor					10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	50	500,000,000	Sekretariat
			Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Geung Kantor					100%	16,000,000	100%	190,000,000	100%	195,000,000	100%	195,000,000	100%	198,000,000	100%	794,000,000	Sekretariat
			Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operaional dinas					100%	129,050,000	100%	190,000,000	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	240,000,000	100%	979,050,000	Sekretariat
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	terpeliharanya peralatan geung kantor					100%	10,700,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	180,700,000	Sekretariat
Rehabilitasi Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor					100%	32,500,000	100%	60,000,000	100%	80,000,000	100%	100,000,000	100%	120,000,000	100%	392,500,000	Sekretariat			
Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	6:01:03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan Kinerja aparatur		100%	17,900,000	100%	18,250,000	100%	19,000,000	100%	21,000,000	100%	24,000,000	100%	100,150,000				
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		100%	17,900,000	100%	18,250,000	100%	19,000,000	100%	21,000,000	100%	24,000,000	100%	100,150,000	Sekretariat			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come) dan Kegiatan (out put)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja, Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	Unit Krja Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						2017		2018		2019		2020		2021						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Peningkatan Kualitas dan kapabilitas SDM	Peningkatan mutu pelayanan sosial	6:01:05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan PNS				8 Orang	52,000,000	8 Orang	58,000,000	10 Orang	68,000,000	10 Orang	78,000,000	10 Orang	256,000,000			
			Pengembangan SDM	Meningkatnya Pengetahuan dan kinerja aparatur				2 Orang	28,000,000	2 Orang	28,000,000	2 Orang	28,000,000	2 Orang	28,000,000	2 Orang	28,000,000	2 Orang	112,000,000	Sekretariat
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kapasitas dan Sumber Daya Aparatur				4 Orang	24,000,000	6 Orang	30,000,000	6 Orang	40,000,000	6 Orang	50,000,000	6 Orang	50,000,000	6 Orang	144,000,000	Sekretariat
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan	Dokumen rencana program dan pendanaan Dinas Sosial	6:01:06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem manajemen pelaporan kinerja dan Keuangan			100%	56,900,000	100%	80,000,000	100%	190,000,000	100%	190,000,000	100%	150,500,000	100%	667,400,000		
			Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan pemerintah daerah tepat waktu							1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	155,000,000	Sekretariat	
			Monitoring Evaluasi Program dan Anggaran	Jumlah Dokumen Monev							9	50,000,000	9	50,000,000	9	5,500,000	9	105,500,000	Sekretariat	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ictisar realisasi kinerja		100%	56,900,000	100%	80,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	406,900,000	Sekretariat
PMKS yang berhak menerima bantuan	Terlaksananya pendataan PMKS dan MPM-PPFM	6:01:15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang menerima bantuan		65%	200,000,000	70%	2,502,857,200	70%	2,620,000,000	75%	2,482,504,000	80%	2,551,470,000	80%	10,356,831,200			
			Pendataan Lanjut Usia	Tersedianya data lanjut usia yang berhak mendapat bantuan				13			1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	92,504,000	1 Dokumen	101,470,000	1 Dokumen	493,974,000	Rehsos dan linjamsos	
			Pendataan dan Pelaporan PMKS	Tersedianya data dan Profil PMKS				1 Dokumen	175,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	775,000,000	Sekretariat
			Pendataan fasilitas UEP bagi keluarga miskin	tersedianya data UEP Keluarga Miskin yang berhak mendapat bantuan				7 Kec	90,000,000	9	100,000,000	11	120,000,000	13	150,000,000	13	460,000,000	13	460,000,000	Pemos dan PFM
			Mekanisme Pemutahiran Mandiri Program Penanganan Fakir Miskin (MPM-PPFM)	Terlaksananya dan Tersedianya Data MPM-PPFM				13 Kec	850,000,000	13 Kec	850,000,000	13 Kec	850,000,000	13 Kec	850,000,000	13 Kec	850,000,000	13 Kec	3,400,000,000	Pemos dan PFM
	Pembinaan dan Monitoring Bansos Rastra dan BPNT		Pendistribusian/Penyaluran Bansos Rastra sampai tujuan dan tepat sasaran				13 Kec	300,000,000	13 Kec	300,000,000	13 Kec	300,000,000	13 Kec	300,000,000	13 Kec	300,000,000	13 Kec	1,200,000,000	Pemos dan PFM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come) dan Kegiatan (out put)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja, Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		Unit Krja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kesiapsiagaan Bencana dan Pemeliharaan Bufferstock Barang Bencana	Korban Bencana yang mendapatkan bantuan		15 Kejadian Bencana	100,000,000	15 Kejadian Bencana	537,316,000	15 Kejadian Bencana	300,000,000	15 Kejadian Bencana	350,000,000	15 Kejadian Bencana	350,000,000	75 Kali Kejadian Bencana	1,637,316,000	Rehsos dan linjamsos
			Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan	Meningkatnya peran PKH dalam meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat		6090 KPM	100,000,000	6090 KPM	550,541,200	7000 KPM	570,000,000	7012 KPM	570,000,000	7012 KPM	600,000,000	7012 KPM	2,390,541,200	Rehsos dan linjamsos
Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang aktif	6:01:21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang aktif		40%	703,345,329	65%	1,347,245,600	70%	1,520,225,000	75%	1,610,000,000	80%	1,730,000,000	80%	6,910,815,929	
			optimalisasi peran dan fungsi karang taruna	Meningkatnya kemampuan manajemen Karang taruna				134 Desa/Kel	120,000,000	134 Desa/Kel	144,000,000	134 Desa/Kel	160,000,000	134 Desa/Kel	190,000,000	13	614,000,000	Pemos dan PFM
			Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) dan PKM	Meningkatnya Peran, fungsi dan pengetahuan masyarakat dan TKSM				40 Org	80,000,000	40 Org	85,000,000	40 Org	90,000,000	40 Org	95,000,000	160 org	350,000,000	Pemos dan PFM
			Pemberdayaan PSKS	Meningkatnya Peran, fungsi dan pengetahuan PSKS				25 org dan 10 Lembaga	80,000,000	25 org dan 10 Lembaga	90,000,000	25 org dan 10 Lembaga	100,000,000	25 org dan 10 Lembaga	110,000,000	25 orang dan 10 lembaga	380,000,000	Pemos dan PFM
			Pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan, perdesaan dan pesisir	Masyarakat miskin perkotaan, perdesaan dan pesisir yang berhak mendapat bantuan				13 Kec	160,000,000	13 Kec	250,000,000	13 Kec	300,000,000	13 Kec	360,000,000	13 Kec	1,070,000,000	Pemos dan PFM
			Penguatan Kelembagaan Komisi Daerah Lanjut Usia	Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Lansia		13 Kec	113,553,250	13 Kec	120,000,000	13 Kec	136,225,000	13 Kec	130,000,000	13 Kec	130,000,000	13 Kec	629,778,250	Rehsos dan linjamsos
			Evaluasi dan Monitoring Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial	Terlaksananya pemantauan bantuan pemberdayaan sosial		13 Kec	112,670,000	13 Kec	287,245,600	13 Kec	300,000,000	13 Kec	300,000,000	13 Kec	300,000,000	13 Kec	1,299,915,600	Pemos dan PFM
	Tumbuhnya semangat kejuangan		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan	Terpeliharanya TMP Yudha Satria dengan baik		12 Bln	42,286,000	12 Bln	50,000,000	12 Bln	55,000,000	12 Bln	60,000,000	12 Bln	65,000,000	12 Bln	272,286,000	Pemos dan PFM
			Peningkatan Peranan Kapasitas Kerja Legun Veteran RI	Meningkatnya kinerja legiium Veteran di Tanjab Barat		12 bln	55,674,304	12 bln	70,000,000	12 bln	75,000,000	12 bln	80,000,000	12 bln	85,000,000	12 Bln	365,674,304	Pemos dan PFM
			Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan	Terlaksananya Kegiatan Upacara Hari Pahlawan		1 Kali Kegiatan	98,850,000	1 Kali Kegiatan	80,000,000	1 Kali Kegiatan	85,000,000	1 Kali Kegiatan	90,000,000	1 Kali Kegiatan	95,000,000	1 Kali Kegiatan	448,850,000	Pemos dan PFM
	Tersedianya data Terpadu Penanganan Fakir Miskin		Verifikasi dan validasi data Terpadu Penanganan Fakir Miskin	Terlaksananya verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin		1 Dokumen	280,311,775	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	1,480,311,775	Pemos dan PFM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come) dan Kegiatan (out put)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja, Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		Unit Krja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Orang terlantar dan penadampinga pengobatan yang dilayani serta ABH, AMPK, Anak dengan disabilitas, anak balita aterlantar dan anak remaja yang rentan yang diberikan pendampingan psikologis	6:01:16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Jumlah PMKS		10%	195,450,000	10%	200,000,000	9%	725,905,000	9%	610,000,000	8%	740,000,000	8%	2,471,355,000	
			Peningkatan Perlindungan dan Asisitensi Sosial Terhadap ABH, Anak Terlantar, AMPK, Anak Dengan Disabilitas, Anak Balita Terlantar dan Anak Remaja Yang Rentan	Jumlah anak yang diberikan pendampingan Psikologis					40 anak	200,000,000	40 Anak	250,000,000	40 anak	250,000,000	40 orang	700,000,000	Rehsos dan linjamsos	
			Santunan Pemulangan Tuna Sosial	Terlaksananya santunan, pengobatan dan pemulangan tuna sosial		35 orang	117,700,000	40 orang	150,000,000	45 orang	200,000,000	45 orang	200,000,000	45 orang	220,000,000	205 orang	887,700,000	Rehsos dan linjamsos
			Operasi Terpadu Tuna Sosial	Masyarakat peduli dan ikut serta dalam pencegahan dan penangan tuna susila, gepeng dan anak jalanan		15 org	77,750,000				166,550,000			30 org	150,000,000	45 Org	394,300,000	Rehsos dan linjamsos
			Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah	Pelajar mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba				100 orang	50,000,000	150 orang	159,355,000	200 orang	160,000,000	200 orang	120,000,000	650	489,355,000	Rehsos dan linjamsos
Meningkatnya akses dan Pelayanan bagi Penyandang cacat dan taruma	Tersedianya akses bagi penyandang cacat	6:01:18	Program Pembinaan para penyandang cacat dan taruma			25%	160,500,000	25%	200,000,000	30%	220,000,000	35%	250,000,000	35%	250,000,000	35%	1,080,500,000	
			Pembuatan aksesibilitas bagi difabel/penyandang cacat	Terbangunnya aksesibilitas bagi difabel/penyandang cacat		1 Paket	160,500,000										160,500,000	Sekretariat
	ASPDB dan Aslut yang dberi Bantuan		Pembinaan ASPDB dan Aslut	Terbinanya ASPDB dan Aslut yang mendapat bantuan				25%	200,000,000	30%	220,000,000	35%	250,000,000	35%	250,000,000	35%	920,000,000	Rehsos dan linjamsos
JUMLAH							2,111,810,848		6,474,977,800		9,202,655,000		6,898,504,000		7,315,970,000		32,003,917,648	

Kuala Tungkal,

2017



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come) dan Kegiatan (out put)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja, Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		Unit Krja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2017		2018		2019		2020		2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Program	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap masyarakat khususnya para Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan melalui Bantuan bagi Keluarga miskin	Meningkatnya kesejahteraan PMKS

Indikator Program	OPD Penanggung jawab
Persentase PMKS yang menerima bantuan	Dinas Sosial



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bagian ini dikemukakan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Untuk melakukan pengukuran kinerja telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

- Indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
- Indikator kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas :
 - a. Indikator Input (masukkan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran)
 - b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik
 - c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung
 - d. Indikator benefit (manfaat) yaitu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan





- e. Indikator impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran pada Dinas Sosial Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PMKS menerima bantuan	35 %	40 %	60 %	70 %	75 %	80 %	80 %
2	Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang aktif	30 %	40 %	60 %	65 %	70 %	75 %	75 %
3	PMKS yang tertangani	10,5 %	10 %	9,5 %	8,5 %	8 %	8 %	8 %
4	Para penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang menerima jaminan sosial	0 %	25 %	25 %	30 %	30 %	35 %	35 %







BAB VIII

PENUTUP

Upaya pencapaian visi dan misi pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode Tahun 2016 - 2021, diarahkan pada pengembangan sistem Kesejahteraan Sosial. Upaya tersebut ditempuh melalui berbagai langkah strategi untuk menciptakan sistem manajemen yang diinginkan, seperti: mengembangkan sistem Kesejahteraan Sosial, memberdayakan aparatur, pemahaman dan penerapan kesejahteraan dan menegakkan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan serta mengoptimalkan seluruh sumber daya Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara bertahap selama lima tahun kedepan agar mampu mendukung pencapaian peningkatan Kesejahteraan Sosial.

Rencana strategi ini adalah merupakan rambu-rambu untuk menciptakan kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat disadari bahwa untuk mengamankan pencapaian sasaran pembangunan dibutuhkan keterpaduan dalam menetapkan kebijaksanaan program, prioritas kegiatan dan alternatif kegiatan serta keterpaduan dukungan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD dan APBD Perubahan, bahkan APBN.

Meskipun disadari bahwa perwujudan Profesionalisme aparatur dan Kesejahteraan Sosial bukan hal yang mudah serta tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten





Tanjung Jabung Barat semata selaku institusi Pemerintah Daerah, namun demikian mengingat Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai bagian dari lembaga pemerintah yang mempunyai peran terdepan dalam mengemban amanat pemerintah untuk menyelenggarakan manajemen Kesejahteraan Sosial, maka Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kewajiban mengaktualisasikan perannya lima tahun kedepan dalam langkah nyata sesuai kompetensi intinya. Apabila Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mampu membawakan peran nyata di bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana diharapkan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat, mudah-mudahan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai institusi pemerintah mampu terus berkembang menghadapi perubahan lingkungannya dalam menyelenggarakan misinya.

Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan tercapainya tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator yang diuraikan dalam Renstra ini, maka perlu di ikuti dengan adanya uraian kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun selama periode Renstra.

Kuala Tungkal,

2017

